

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Letaknya sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra yaitu, samudra hindia dan samudra pasifik. Posisi ini membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, keanekaragaman budaya, serta peran penting dalam jalur perdagangan dan lalu lintas internasional. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 kilometer. Dari jumlah tersebut, 111.000 pulau telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pulau-pulau kecil terluar yang berfungsi sebagai batas kedaulatan negara (Filemon et.al, 2024).

Pulau-pulau kecil terluar memiliki arti penting bagi Indonesia, bukan hanya sebagai batas geografis, tetapi juga sebagai benteng pertahanan dan simbol kedaulatan negara. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan wilayah ini sangat strategis secara politik, ekonomi, dan keamanan. Namun, di balik nilai strategis tersebut, banyak pulau kecil terluar yang masih menghadapi persoalan serius seperti minimnya infrastruktur, keterbatasan akses transportasi, belum tersedianya fasilitas dasar, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki wilayah perbatasan sering kali belum dimanfaatkan secara optimal (Sari et.al. 2021).

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan

perairan internasional. Kondisi tersebut menjadikan Bintan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Salah satu pulau kecil terluar yang berada di wilayah ini adalah Pulau Sentut, yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Bintan. Sebagai pulau kecil terluar, Pulau Sentut berfungsi sebagai dasar penarikan garis pangkal kepulauan dan memiliki arti penting dalam penegasan batas wilayah negara. Pengelolaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pulau-pulau kecil terluar harus dilindungi, dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan diamankan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Selain memiliki fungsi strategis, Pulau Sentut juga memiliki potensi sumber daya alam, perikanan, dan pariwisata yang dapat mendukung pembangunan daerah (Suharyanto, 2022).

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Di Kabupaten Bintan, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab Bagian Pengelola Perbatasan yang berperan mengoordinasikan program serta pengawasan wilayah, termasuk Pulau Sentut. Mengingat letaknya sebagai pulau kecil terluar yang menjadi acuan penentuan batas laut Indonesia, diperlukan strategi pengelolaan yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara serta mengoptimalkan potensi wilayahnya (Kusuma, 2022).

Sebagai pulau kecil terluar yang berada di jalur pelayaran internasional,

Pulau Sentut memiliki peran strategis dalam pertahanan, keamanan, dan penegasan batas wilayah Indonesia. Pengamanannya dilakukan melalui koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi potensi sumber daya alam dari aktivitas ilegal. Di sisi lain, Pulau Sentut juga rentan terhadap abrasi dan dampak perubahan iklim, sehingga pengelolaannya harus mengedepankan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pulau Sentut merupakan wilayah strategis yang perlu dikelola secara optimal sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerja sama pengawasan wilayah pelayaran dan wilayah perbatasan dapat mencegah berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan, serta praktik *illegal fishing* yang kerap terjadi di kawasan perbatasan. Selain itu, Kabupaten Bintan dapat memanfaatkan model kerja sama regional untuk membangun kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem teknologi pengawasan maritim, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman di laut (Bagaskara, 2024). Pertukaran informasi intelijen secara efektif antarnegara mitra juga menjadi langkah penting untuk mendukung keamanan maritim sekaligus mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Dengan melibatkan berbagai mitra strategis, baik secara bilateral maupun multilateral, pengelolaan Pulau Sentut sebagai pulau kecil terluar dapat berlangsung lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan nasional menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan (Jarot, 2024).

Sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan mitra internasional harus terus ditingkatkan untuk menjamin keamanan, kemakmuran,

serta pelestarian lingkungan Pulau Sentut dan sekitarnya. Strategi ini tidak hanya memperkuat pertahanan fisik, tetapi juga membangun basis diplomasi maritim yang kokoh di tingkat regional (Ferry, 2023). Strategi penguatan pertahanan dan keamanan menjadi hal krusial bagi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki posisi strategis dan rentan terhadap pelanggaran wilayah perairan maupun kedaulatan. Kejahatan lintas negara menjadi tantangan serius yang harus diatasi melalui penguatan peran berbagai institusi, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Triadi et.al, 2025).

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, sehingga diperlukan strategi kolaboratif melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta dalam bentuk investasi. Pembentukan kementerian penanaman modal berperan penting dalam mempercepat arus investasi domestik dan asing, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengelola potensi tersebut secara optimal. Menjaga kedaulatan dan keamanan maritim, strategi bagian perbatasan di Kabupaten Bintan dalam mengelola Pulau Sentut sebagai pulau kecil terluar harus mampu memperkuat pertahanan wilayah perbatasan laut. Pulau Sentut yang terletak di kawasan strategis perbatasan nasional memerlukan pengawasan ketat dan pengelolaan yang cerdas agar tidak menjadi celah bagi ancaman eksternal, seperti pelanggaran batas, *illegal fishing*, maupun aktivitas ilegal lintas negara lainnya, salah satu strategi utama adalah melakukan peningkatan sistem pengawasan yang terpadu, seperti

penggunaan teknologi komunikasi dan intelijen modern, termasuk drone pengawasan dan sistem radar otomatis yang mampu memantau aktivitas di wilayah perairan secara *real time* (Kusumawati, 2021). Pengembangan pusat komando terpadu di Bintan sebagai pusat pengawasan juga sangat penting untuk mendukung patroli rutin dan respon cepat terhadap insiden di perbatasan (Sianturi, 2022).

Penguatan armada laut, termasuk kapal patroli dan kapal perang kecil, juga sangat penting agar mampu melakukan patroli secara rutin dan menjaga titik-titik rawan di sekitar Pulau Sentut. Armada ini harus dilengkapi perlengkapan komunikasi dan pengindraan yang modern sehingga mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dari jarak jauh dan secara otomatis. Dalam rangka mengelola dan melindungi Pulau Sentut sebagai pulau kecil terluar, harus ada kebijakan yang jelas terkait pengelolaan wilayah perbatasan laut yang meliputi aspek hukum, keamanan, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini harus didukung oleh regulasi dan kebijakan nasional, seperti peraturan presiden dan undang-undang tentang pengelolaan wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil serta penguatan peran masyarakat adat dan nelayan lokal sebagai bagian dari sistem pengawasan juga dapat menjadi strategi yang efektif. (Sutrisno, 2025).

Penerapan konsep zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen harus dipertegas dengan pengukuran dan pemetaan wilayah secara akurat (Usman, 2023). Pemetaan ini harus didukung teknologi satelit dan sistem geographic information system (GIS) yang mutakhir, sehingga klaim dan pengelolaan wilayah perairan dapat dilakukan berdasarkan data yang valid dan terverifikasi. Selain aspek penguatan bahan dan teknologi, strategi diplomasi dan kerjasama keamanan

internasional juga harus terus dilakukan, hal ini penting agar Indonesia dapat secara aktif berpartisipasi dalam forum regional, seperti ASEAN maritime forum dan kode etik keamanan laut internasional, untuk memperkuat posisinya di kawasan. Menurut Deanto (2024) Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas logistik di wilayah perbatasan seperti pulau sentut harus diperkuat agar mendukung mobilitas sumber daya dan memperlancar patroli serta pengawasan laut. Pengelolaan Pulau Sentut sebagai pulau kecil terluar harus mampu menyeimbangkan antara penguatan aspek pertahanan dan perlindungan sumber daya alam, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pendekatan inovatif dan kolaboratif menjadi kunci utama agar wilayah perbatasan ini mampu berfungsi optimal sebagai benteng dan sumber daya nasional (Nugraha, 2024).

Pulau Sentut adalah salah satu pulau kecil di perairan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia yang secara administratif berada di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Timur. Pulau ini dikenal sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan perairan negara tetangga. Koordinat geografis Pulau Sentut berada di sekitar 1,04778° LU dan 104,83056° BT, menunjukkan letaknya yang jauh dari pusat pemukiman besar dan lebih dekat ke wilayah laut internasional di Selat dan Laut China Selatan. Secara morfologi, pulau ini berbentuk kecil dengan daratan menonjol menyerupai bukit rendah yang tertutup vegetasi dan permukaan bebatuan di pinggir pantainya, sehingga tidak cocok untuk pemukiman permanen. Karena tidak berpenghuni, Pulau Sentut menjadi bagian dari pulau yang dipantau secara strategis untuk kedaulatan negara, terutama dalam konteks geopolitik perbatasan laut. Status pulau ini juga tercantum dalam keputusan

presiden yang menetapkan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia, termasuk peraturan terkait penetapan zona laut dan garis pangkal negara. Kebijakan pengamanan pulau kecil terluar mencatat bahwa pulau-pulau seperti Pulau Sentut ikut menjadi bagian dari wilayah strategis yang perlu mendapat pengelolaan khusus dalam tata ruang laut Indonesia. Hal ini juga mencakup perlunya kebijakan yang memperkuat struktur pertahanan, pengawasan maritim, serta keterlibatan aparat dalam kegiatan simbolis dan operasional di pulau-pulau tersebut. Secara ekologis, pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau termasuk Pulau Sentut umumnya berada di wilayah laut tropis yang kaya akan biodiversitas ekosistem lamun, terumbu karang, dan biota laut lain di sekitarnya. Pulau Bintan menunjukkan bahwa sebaran lamun dan habitat laut yang sangat penting, padang lamun seperti di pesisir Bintan menjadi habitat bagi spesies laut, yang menunjukkan konektivitas ekosistem antara pulau-pulau kecil dan pulau utama di wilayah Pulau Sentut.

Perubahan iklim dan dinamika laut seperti gelombang, arus, dan abrasi pantai menjadi fokus terpenting bagi keseluruhan ekosistem pesisir Kepulauan Riau. Dalam kajian kebijakan nasional, pulau-pulau kecil terluar seperti Pulau Sentut juga menjadi bagian dari strategi nasional Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan laut dan mengatur pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Fenomena abrasi pantai adalah proses di mana daratan pesisir perlahan-lahan terkikis oleh gelombang laut, arus, dan pasang surut. Abrasi umumnya terjadi di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki penghalang alami yang kuat seperti hutan bakau atau struktur protektif pantai, lajunya abrasi di pulau-pulau pesisir pada umumnya bisa sangat bervariasi tergantung pada karakteristik sedimen, bentuk

garis pantai, dan eksposurnya terhadap gelombang laut. Faktor lain yang mempercepat abrasi adalah kurangnya vegetasi penahan erosi, seperti bakau di beberapa pulau kecil, yang secara alami dapat memecah energi gelombang, kurangnya perlindungan vegetasi membuat pantai lebih mudah terkikis saat gelombang besar datang.



Sumber: peta pulau sentut

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Strategi Bagian Pengelola Perbatasan Kabupaten Bintang dalam Pengelolaan Pulau Sentut Sebagai Pulau Kecil Terluar Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Strategi Bagian Pengelola Perbatasan Setda Kabupaten Bintang dalam Pengelolaan Pulau Sentut Sebagai Pulau Kecil Terluar indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan Pulau Sentut sebagai pulau kecil terluar yang diterapkan oleh bagian perbatasan di

Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Ada tiga manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapan kami adalah bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pustaka dan dapat memberikan ilmu sosial dan ilmu politik bagi peneliti lanjutan khususnya ilmu pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami dinamika pengelolaan wilayah perbatasan dan strategi pembangunan pulau kecil terluar, khususnya di Pulau Sentut Kabupaten Bintan. Melalui proses penelitian, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, kerja sama maritim, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan wilayah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis ilmiah, berpikir kritis, serta keterampilan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kompetensi akademik dan profesional penulis di bidang ilmu pemerintahan, terutama dalam isu pertahanan, keamanan, dan pengelolaan wilayah perbatasan.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan

kebijakan tantangan dan strategi pengelolaan pulau sentut sebagai pulau kecil terluar yang memiliki nilai strategis. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan wilayah laut, serta mengoptimalkan program pembangunan berbasis potensi maritim lokal.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kedaulatan wilayah, konservasi lingkungan, serta peluang ekonomi yang berbasis kelautan.

